

Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia

Abdul Rahman

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Article History:

Received: 17 Maret 2022

Revised: 29 Maret 2022

Accepted: 30 Maret 2022

Keywords: Masyarakat sipil, Reformasi 1998, Demokratisasi

Abstract: Dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia kekuatan masyarakat sipil selalu memiliki peranan penting dalam mengawal proses demokrasi, termasuk pada gerakan reformasi 1998. Peneliti ini bertujuan untuk mengelaborasi mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi 1998 yang berhasil memberhentikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang memerintah sekitar 32 tahun. Metode yang digunakan ialah metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses reformasi dimulai dari adanya kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam hal ini mahasiswa, peneliti, dan dosen aktif melakukan diskusi-diskusi sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi ekonomi pada tahun 1997. Aksi tersebut berujung pada gerakan massa berupa demonstrasi di berbagai wilayah Republik Indonesia yang pada akhirnya membuat Soeharto berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Hasil penelitian ini penting sebagai penguatan bahwa kekuatan masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam mengawal demokratisasi di Indonesia, sekaligus menekankan bahwa pemerintahan yang ditopang oleh berbagai kekuatan politik tetapi korup dan tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dapat berakhir dengan kekuatan massa sipil.

PENDAHULUAN

Jika ditilik dari sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia, maka tidak bisa dilepaskan dari adanya proses suksesi politik. Dinamika sosial masyarakat eropa, pada khususnya Perancis yang kemudian dikenal dengan adanya sebuah revolusi politik yang terjadi pada tahun 1789 (Christmas & Purwanti, 2020; Puspitasari, 2018). Revolusi ini tentunya membawa angin segar terhadap politik liberal yang diperjuangkan sejak kekuasaan monarki absolut para kaisar di Eropa. Walaupun demikian, revolusi ini juga memunculkan kekacauan sosial dan ketidakmampuan struktur masyarakat. Dari fenomena inilah, kemudian Auguste Comte mencetuskan filsafat positif yang tujuannya adalah mengembalikan kualitas tatanan masyarakat yang damai tanpa mereduksi kemerdekaan politik. Revolusi industri di Eropa yang mengubah model produksi tradisional

menjadi model produksi moderen menghasilkan produk secara masal telah ikut berperan dalam mengubah struktur sosial masyarakat Eropa pada awal abad 19 (Haqqi & Wijayati, 2019). Kemunculan kelompok-kelompok pemilik modal yang menguasai kegiatan perekonomian ikut pula menjadi penyebab tertindasnya kalangan yang tidak memiliki sumber daya modal. Kondisi masyarakat yang sedemikian inilah yang menghantarkan Karl Marx dalam menganalisis masyarakat berdasarkan perspektif konflik.

Pengamatan terhadap fenomena konflik dan dinamika sosial juga sudah mulai muncul di Afrika beberapa abad sebelum kelahiran sosiologi secara resmi di Eropa. Pada abad XIV yang ditandai dengan runtuhnya Dinasti Abbasyiah sebagai ujung dari serangan bangsa Mongol (Zulfikar, 2018). Masa ini ditandai dengan adanya proses pergantian kekuasaan yang sedemikian rupa sehingga membawa kondisi politik yang labil. Berbagai elemen yang memiliki kepentingan tertentu melakukan gerakan perebutan kekuasaan terhadap penguasa yang sah sehingga menyebabkan masyarakat dalam kondisi politik yang dinamis. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan teori konflik kelompok dan hukum sosial masyarakat yang diprakarsai oleh Ibnu Khaldun. Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial baik pada nilai dan strukturnya baik secara revolusioner maupun evolusioner. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam bermacam bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, mengubah pandangan hidup, dan kepentingan merebut peran politik/kekuasaan (Susan, 2014).

Perubahan sosial, oleh para penganut pendekatan konflik tidak saja dipandang sebagai gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat, akan tetapi lebih daripada itu malahan dianggap bersumber di dalam faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, suatu hal yang kurang diperhatikan oleh para penganut pendekatan fungsionalisme struktural. Perubahan sosial yang sedemikian terutama timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam setiap masyarakat. Kontradiksi interen tersebut bersumber di dalam kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas secara tidak merata (Nasikun, 2008).

Perubahan sosial, termasuk perubahan politik dan kekuasaan dalam lingkungan internasional juga mulai menggejala sekitar tahun 1990-an. Runtuhnya Uni Soviet mengakhiri periode panjang konflik internasional yang melibatkan dua kekuatan besar yakni negara-negara yang berhaluan kapitalisme liberal yang dipelopori oleh Amerika Serikat (Blok Barat) versus negara-negara yang berkongsi dalam Blok Timur, yang mana Uni Soviet sendiri sebagai pelopor utama dengan menjadikan Komunis sebagai ideologi mereka. Sebaliknya, konflik internal, konflik etnis, konflik separatis dan konflik perebutan kekuasaan pada banyak negara ternyata berubah menjadi suatu hal yang lazim. Sebagai contoh adalah gerakan *people power* yang berhasil menggulingkan Marcos dari tampuk kepresidenan di Philipina. Demikian pula suatu peristiwa yang melanda Negara Republik Indonesia, yang di kenal sebagai gerakan reformasi yang menghantarkan Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya (Rahman, Ahmadin, & Rifal, 2021).

Tentunya ketika hal tersebut direnungkan secara mendalam, tidaklah mungkin seorang presiden yang memiliki kendali dan kontrol kekuasaan secara penuh terhadap seluruh perangkat-perangkat kenegaraan termasuk kekuatan militer dapat ditumbangkan. Akan tetapi ketika fenomena itu dipandang dari perspektif filsafat sejarah yang menerangkan bahwa segala yang ada di muka bumi selalu silih berganti, mengalami pergeseran terus menerus baik secara cepat ataupun lambat, tentunya akan berakhir, apakah itu berakhir dalam kondisi yang baik ataupun kondisi yang buruk. Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan merupakan sesuatu yang lumrah, dan tidak bisa dilepaskan dari adanya peran masyarakat sipil yang menginginkan perbaikan dan

penataan praktek pengelolaan negara yang telah dianggap menyimpang dari dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Runtuhnya rezim orde baru membawa perubahan terutama dalam peta konfigurasi politik di Indonesia (Mughits, 2016). Momen itu begitu menentukannya sehingga seolah menjadi batas berakhirnya masa kegelapan akan order silam. Segala respon sikap menjadi begitu reaktif setelah melewati masa-masa yang diselimuti oleh *phobia* hantu otoritarianisme itu. Bandul kekuasaan bergeser yang tadinya terpusat begitu dominan di tangan seorang presiden, khawatir akan ingatan kelam masa silam, begitu saja berbalik secara berlawanan di tangan lembaga perwakilan. Tidak hanya itu, dalam ranah sosial-budaya, wacana tentang penguatan masyarakat sipil semakin mengemuka, kebebasan berekspresi, berpendapat makin mendapat tempat karena model pemerintahan yang terpusat dan dominan telah sama sekali ditolak berganti dengan model pemerintahan demokratis. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa demokrasi menjadi pilihan yang cukup ideal untuk membenahi berbagai persoalan hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang telah demikian korup. Pasca Soeharto merupakan momen untuk berbenah diri terutama dalam memantapkan demokratisasi agar dapat berlangsung sepenuhnya di Indonesia. Para demokrat sering menyebut Indonesia kini sedang berada dalam *track* yang benar selama pembenahan dapat dilakukan secara bertahap namun pasti menjadi untuk negara yang demokratis. Semangat melakukan perubahan, mereformasi pemerintahan dan tatanan sosial merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai tahap transisi menuju demokrasi. Dalam masa ini perangkat-perangkat demokrasi seperti pengakuan dan penegakan HAM, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat sedikit demi sedikit dipersiapkan menuju konsolidasi, hingga demokrasi sepenuhnya. Tahapan ini bergerak secara linear tapi pasti dimana yang pertama menjadi syarat bagi yang selanjutnya. Reformasi menjadikan Indonesia telah beranjak dari rezim otoriter ke era yang penuh keterbukaan, setidaknya ia telah membuat masyarakat justru menjadi *euforia* yang dipenuhi dengan harapan akan hadirnya tatanan kenegaraan yang baru. Kehadiran reformasi di Indonesia tentu bukan hanya kerja-kerja kelompok elite. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi peran masyarakat sipil pada saat digulirkannya reformasi pada tahun 1998.

LANDASAN TEORI

Negara Indonesia mengakui demokrasi sebagai sebuah sistem ideal dalam menjalankan praktik-praktik kenegaraan. Menurut Friederich A. Hayek, demokrasi merupakan alat untuk mencapai tujuan sekaligus sebuah sistem untuk memberikan perlindungan internal dan kemerdekaan individual (Mufti, 2013). Dalam konteks Indonesia pada masa Orde Baru, demokrasi yang dijalankan ialah prinsip demokrasi Pancasila. Namun pada pelaksanaannya Pancasila diberi tafsir tunggal oleh pemerintah dan lebih banyak digunakan untuk menegakkan stabilitas nasional. Atas nama menjaga stabilitas nasional, masyarakat dibatasi untuk ikut pada partai politik, tetapi lebih banyak diarahkan ke Golkar.

Gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam memperjuangkan kepentingan yang berkaitan dengan isu-isu sosial politik dalam masyarakat (Sukmana, 2016). Lahirnya gerakan reformasi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai gejolak sosial yang bermula pada tahun 1997. Pembangunan yang digalakkan oleh rezim Orde Baru ditopang oleh hutang luar negeri yang sudah mulai jatuh tempo pembayarannya. Akibatnya terjadi krisis moneter yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat akibat kebutuhan pokok mulai langka dan mahal.

Jika diulas dari pandangan Vilfredo Pareto, reformasi merupakan proses sirkulasi elite. Pareto merupakan orang yang sezaman dengan Max Weber dan Emile Durkheim. Pareto mempertahankan pandangan bahwa setiap bidang usaha memiliki elitennya sendiri, terdiri dari orang-orang yang sepertinya paling baik dalam aktivitas yang sedang diperhatikan (Mustofa, 2019). Masuknya seseorang untuk dikategorikan sebagai elite adalah kemampuan, bukan kebajikannya di berbagai bidang para pendukungnya terikat untuk menjadi lebih berbakat dari yang lainnya., sehingga mengangkat mereka ke atas. Di antara kelompok elite ini, ada orang-orang elite yang memerintah, dibuktikan dengan kemampuan mereka yang paling baik dalam perpolitikan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan empat langkah metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003). Heuristik dimaksudkan sebagai upaya mencari dan mengumpulkan sumber berupa buku dan jurnal yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi 1998. Kritik dimaksudkan untuk memberikan penilaian dan pengecekan informasi dengan cara mengkomparasikan berbagai data. Interpretasi adalah penafsiran terhadap data dan fakta serta penetapan makna yang dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu maupun teori sebagai alat analisis. Sedangkan historiografi ialah rekonstruksi secara tertulis terhadap data dan fakta yang terkait dengan reformasi 1998 sebagai bahan informasi dalam mendukung pengembangan ilmu sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Menjelang Sukses Politik 1998

Seiring dengan pergantian rezim pemerintahan, yakni peralihan pemerintahan Republik Indonesia dari Presiden Soekarno yang diidentikkan sebagai Orde Lama, ke Soeharto sebagai representasi yang mengklaim diri sebagai Orde Baru, maka terjadi gaya sistem politik *corporatic* dan *bureaucratik authoritarian*. Dalam sitem politik yang demikian ini, sama sekali tidak ada arena publik yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Ruang publik, sepenuhnya dikendalikan oleh rezim berkuasa yang terdiri atas lembaga kepresidenan, militer dan para konglomerat. Dalam formasi politik seperti ini, yang terjadi adalah lembaga kepresidenan yang memiliki kekuasaan penuh dan mutlak, namun dilain sisi muncul kabinet yang tersubordinat, parlemen yang sekedar tukang stempel, dan lembaga peradilan yang tidak otonom (Maliki, 2018).

Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Orde Baru ketika memasuki tahun 1973 adalah melakukan fusi terhadap partai politik (Yusup, 2021). Pada era ini, Indonesia hanya mengenal sitem satu setengah partai, yaitu, tiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang terdiri dari PPP dan PDI, ditambah satu golongan fungsional, yaitu Golongan Karya. Jika ditilik dari perspektif hukum, Golkar bukanlah partai politik, tetapi dalam perjalanannya organisasi ini memainkan peran dan fungsi-fungsi sebagaimana layaknya partai politik. Karena Golkar mendominasi kehidupan kepartaian, bahkan sejak pemilu 1971 yang diikuti 11 kontestan, maka sesungguhnya kepartaian di Indonesia hanya berjalan dengan sitem satusetengah partai. Kisah selanjutnya, dari sistem ini sudah menjadi milik publik, yaitu bahwa sistem kepartaian, bersama dengan birokrasi dan militer, telah menjadi mesin politik yang efektif bagi Orde Baru (Sulistyo, 2002).

Ringkasnya, tidak ada ruang manufer apapun bagi oposisi dari partai. Pada akhir 1970an, PPP sempat tumbuh menjadi saingan yang potensial terhadap Golkar. Dalam pengandaian sejarah yang paling mustahil pun, seperti jika PPP menguasai sepenuhnya kursi di parlemen, jumlahnya belumlah signifikan untuk menghadang kekuatan Soeharto. Pada masa itu, ABRI masih mendapat

jatah kursi sebanyak 15 persen di parlemen, sementara anggota parlemen (500 orang) hanya setengah dari jumlah seluruh anggota MPR (1000 orang). Begitu pula halnya dengan PDI, yang bahkan lebih lemah dibandingkan dengan PPP. Perolehan suara tertinggi PDI terjadi pada pemilu 1992, dengan 11 persen. Dengan jumlah sekecil ini saja, pemerintah sudah beranggapan, PDI bisa merupakan ancaman yang berbahaya, sehingga perlu dikendalikan. Suatu pencegahan yang berpuncak pada apa yang kemudian dikenal dengan Tragedi 27 Juli 1996, yaitu penyerbuan markas PDI.

Dilihat dari posisi Soeharto, lembaga yang paling menentukan adalah MPR. Padahal 57 persen anggota MPR diangkat oleh presiden. Sisanya, yang secara teknis dipilih melalui pemilu (untuk anggota DPR) harus melalui proses skrining. Semua calon harus melalui proses administratif yang dirancang untuk menyeleksi siapa yang berpotensi untuk mendukung rezim pemerintahan, dan siapa yang berpotensi menjadi oposisi. Setelah seleksi ketat seperti itupun, Presiden Soeharto masih memiliki wewenang untuk memutus kata akhir mengenai pencalonan. Jadi, baik anggota DPR dan terutama anggota MPR, pastilah seorang loyalis. Tidak mengherankan kalau mereka sulit menangkap hati nurani rakyat. Karena itu pula, mereka tidak mampu menangkap gejala awal krisis moneter, dan bahkan gejala tengah krisis kepercayaan. Pada bulan Januari 1998, misalnya ketua DPR/MPR Harmoko menegaskan, mayoritas rakyat Indonesia masih menghendaki Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Dengan sikap serupa, Akbar Tandjung dengan penuh percaya diri memimpin Golkar untuk memilih kembali Soeharto sebagai Presiden RI dalam SU MPR bulan maret 1998.

Sementara dalam bidang perekonomian, skala dan merebaknya dampak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pada tahun 1997 sudah sangat melebihi perkiraan hampir semua pihak saat terjadinya krisis nilai tukar yang melanda sebagian besar negara-negara Asia Timur. Dalam jangka waktu hanya 13 bulan, perekonomian Indonesia mengalami guncangan hebat yang nyaris meruntuhkan seluruh bangunan perekonomiannya, mulai dari sektor perbankan, sektor produksi hingga ke sektor pedesaan.

Apabila dilihat urutannya, krisis ini dimulai dengan krisis nilai tukar yaitu melemahnya nilai tukar Rupiah yang dimulai sekitar bulan Juli 1997 dan mencapai titik terendah pada bulan Mei 1998. Imbasnya secara langsung mempengaruhi sektor moneter, terutama melalui penutupan beberapa bank sakit dan terkurasnya likuiditas perbankan. Munculnya krisis kepercayaan investor dan ekspektasi terhadap membesarnya skala krisis menyebabkan arus pelarian modal keluar dan diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga melonjak pesat. Sektor riil, terutama sektor produksi, yang sudah sempat terpukul akibat melemahnya rupiah yang secara drastis menaikkan kewajiban membayar kembali hutang luar negerinya semakin terpuruk dengan naiknya tingkat bunga. Terganggunya beberapa sektor produksi penting pada akhirnya kembali menekan sektor perbankan dalam bentuk peningkatan kredit bermasalah dan krisis likuiditas. Pada tahap ini efek bola salju dan keterkaitan antar sektor bekerja bersama dalam menarik turun perekonomian Indonesia menuju krisis ekonomi terburuk selama 35 terakhir.

Ada dua kelompok pendapat yang berbeda mengenai penyebab krisis ekonomi di Asia, khususnya di Indonesia kelompok pertama lebih menekankan bahwa krisis ini tidak dipengaruhi oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah atau faktor-faktor internal suatu negara, tetapi lebih disebabkan oleh perilaku *random* para pelaku di pasar modal. Seperti yang dikemukakan oleh Griffith-Jones (1998), serangan spekulator tidak didorong oleh lemahnya fundamental ekonomi tetapi lebih disebabkan oleh ekspektasi memburuknya kondisi makroekonomi suatu negara, yang ironisnya merupakan dampak dari perilaku para spekulasi tersebut, sehingga para spekulasi dapat melakukan aksi *profit taking* yang sebesar-besarnya melalui selisih antara nilai tukar sebelum krisis

dan pasca krisis. Hal ini mengimplikasikan bahwa fundamental perekonomian adalah syarat perlu tapi bukan syarat cukup untuk menghindari krisis ekonomi.

Pendapat kedua diajukan oleh ekonom terkenal, Montes yang menyatakan bahwa krisis adalah hukuman bagi dosa yang dilakukan oleh negara-negara Asia pada umumnya (Wolf, 2007). Dosa tersebut berupa inkonsistensi kebijakan pemerintah yang menyebabkan sektor finansial yang lemah dan rentan terhadap gejolak eksternal. Permasalahan *moral hazard* dan masalah pemberian pinjaman. Secara sederhana, *moral hazard* tersebut terjadi bila ada perbedaan persepsi antara pihak swasta dengan pemerintah. Pihak swasta meyakini bahwa pemerintah akan membantu dan memberikan jaminan sepenuhnya terhadap kewajiban luar negeri apabila terlibat kesulitan. Hal ini menyebabkan tidak adanya insentif untuk melakukan manajemen risiko pinjaman, justru akan mendorong mereka untuk melaksanakan pinjaman beresiko tinggi. Ditambah dengan pelaksanaan pengawasan perbankan yang lemah menghadapi struktur sektor keuangan yang sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Untuk dapat membuktikan pendapat kelompok mana yang lebih relevan dalam menjelaskan kasus Indonesia, tampaknya perlu dilihat secara lebih mendalam kondisi makroekonomi dan mikroekonomi Indonesia pada saat menjelang krisis, indikator makroekonomi Indonesia memberikan gambaran yang cukup baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1990 mencapai rata-rata 7 persen dan merupakan salah satu tertinggi di dunia. Tingkat inflasi juga bertahan pada tingkat di bawah dua digit, bahkan mencapai hanya sekitar 6 persen pada tahun 1996 yang secara psikologis dianggap aman (Putra & Indrajaya, 2013).

Anggaran pemerintah dikelola secara berhati-hati dan mencatat angka surplus yang cukup besar sehingga mampu melakukan percepatan pembayaran hutang. Tingkat tabungan domestik juga mencata angka pertumbuhan yang mengesankan. Gencarnya proses industrialisasi yang dilakukan menyebabkan tingkat tabungan dan memberi justifikasi bagi masuknya tabungan luar negeri dalam bentuk arus modal masuk. Di sektor luar negeri, meskipun neraca perdagangan terus mencatat defisit, namun diimbangi dengan besarnya surplus neraca modal sehingga nilai akumulasi cadangan devisa terus meningkat dan mencapai puncaknya pada Juni 1997 senilai 20,3 milyar dollar AS (Andrianus & Niko, 2006). Kondisi makroekonomi internasional saat itu juga relatif stabil serta rendahnya tingkat bunga internasional yang mengindikasikan tidak adanya permasalahan dalam pembayaran angsuran hutang. Tidak mengherankan jika sampai Agustus 1997, lembaga-lembaga pemeringkat internasional seperti *Moody's* dan *Euromoney* yang selalu menjadi acuan para investor masih tetap memberikan evaluasi yang positif bagi kinerja perekonomian Indonesia.

Namun apabila kita menelaah lebih lanjut beberapa indikator ekonomi secara lebih mendalam dan melakukan interpretasi ulang serta melihat keterkaitan antara indikator tersebut maka akan terlihat sudah adanya sinyal bahaya ke arah krisis. Sinyal bahaya tersebut dalam bentuk dalam bentuk ketidakseimbangan eksternal serta beberapa indikator keuangan yang luput dari perhatian. Ketidakseimbangan eksternal dapat dilihat dari neraca pembayaran Indonesia. Meskipun defisit neraca berjalan sudah menjadi fenomena umum, namun antara 1990-1996, besarnya defisit tercatat sekitar 3,5 persen dari GDP yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 1985-1989 sebesar 2 persen dari GDP (Hakim, 2016). Selama ini neraca berjalan Indonesia dianggap tidak membahayakan, terutama karena dikompensasi oleh surplus neraca modal yang sangat besar, artinya defisit ini menunjukkan arus investasi yang besar dan bukan disebabkan oleh defisit fiskal, malah pemerintah selalu mencatat surplus fiskal.

Namun, menurut Stiglist, defisit neraca berjalan merupakan cerminan dari defisit sektor swasta mengindikasikan bahwa pembiayaan swasta selama ini mengandalkan pembiayaan hutang

dan bukan pembiayaan modal (Hariyanto, 2020). Hal lain yang patut mendapat perhatian adalah selama ini defenisi surplus anggaran di Indonesia berbeda dengan defisit umum terutama karena pembiayaan luar negeri, termasuk hutang dianggap sebagai penerimaan pemerintah. Implikasi dari defisit neraca berjalan yang berkepanjangan adalah besarnya arus modal masuk. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah efisiensi pengelolaan arus modal masuk.

Secara umum dalam ilmu ekonomi dapat diterima bahwa arus modal masuk, baik berupa hutang dan investasi, adalah sesuatu yang mutlak diperlukan suatu negara yang menganut paham ekonomi terbuka. Namun, khususnya untuk hutang harus dapat diubah untuk menjadi *income generating asset* yang nantinya akan digunakan untuk membayar kembali angsuran pokok dan bunga. Hal inilah yang tampaknya terjadi di Indonesia yaitu masalah ketidaksesuaian struktur waktu arus dana luar negeri. Semakin pendek jangka waktu arus dana yang masuk, semakin rentan kondisi perekonomian terhadap gejolak domestik dan internasional. Hal ini juga dikaitkan dengan sumber pembiayaan domestik yang mendorong terjadinya *maturity mismatch* yang dapat menimbulkan masalah likuiditas jika terjadi gejolak eksternal yang besar (Djambak, 2008).

Masyarakat Sipil dan Berakhirnya Orde Baru

Pidato singkat pada pukul 09.00 WIB tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka sungguh merupakan suatu antiklimaks. Sejak awal tahun 1990-an sebenarnya Soeharto sudah memberikan isyarat-isyarat ia sudah tidak ingin dipilih lagi sebagai Presiden. Beredar pula isu secara luas yang menyatakan bahwa kalau pun ia terpilih lagi, Soeharto pasti akan mengundurkan diri di tengah jalan. Beberapa pihak yang skeptis menyimpulkan bahwa hal itu hanya sekedar basa-basi politik untuk meredam keresahan publik meningat panjangnya periode masa jabatannya sebagai Kepala Negara Pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan mereka yang optimis, sibuk menyiapkan jago mereka untuk memperebutkan jabatan Wakil Presiden yang mendadak berubah dari sekedar ban serep menjadi posisi strategis.

Tahun demi tahun berlalu. Isyarat dan isu terus bergulir. Kedudukan Soeharto ironisnya malah terlihat semakin kuat. Banyak orang yang percaya bahwa ia bukan lagi semata Presiden, melainkan Raja. Secara politis, ia tidak mungkin digantikan. Baik yang skeptis maupun yang optimis hanya tinggal berharap kepada satu faktor tunggal yang jelas tidak akan dapat dimanipulasinya, yakni faktor usia. Kredonya seakan menjadi “biarlah Soeharto terus menjadi Presiden, suatu saat yang dapat dipastikan tidak lama lagi, toh ia akan mati”. Karena itu alih-alih menegakkan demokrasi dan keadilan, para bawahannya yang sebenarnya sudah tertekan dan muak atas kepemimpinannya yang termasuk paling lama di dunia itu malah sibuk menghitung-hitung, melihat isyarat kapan Soeharto akan uzur atau bahkan meninggal. Analisis politik murni mulai ditinggalkan sejumlah pengamat tertentu justru lebih suka membuat prediksi medik, klenik dan historis.

Beberapa pengamat memperhatikan kondisi kesehatan Soeharto. Terlepas dari latar belakang pendidikan dan profesinya, para pengamat lebih tertarik untuk menelaah keadaan jantung, kolesterol, liver, ginjal, dan kelenjar prostat seorang pasien orang nomor satu. Berita dan isu bahwa yang bersangkutan mengalami *stroke*, koma, pingsan, atau sekedar menjalani *general check-up* di suatu rumah sakit jelas merangsang mereka untuk membuat berbagai spekulasi yang kontroversial. Masih segar dalam ingatan bagaimana seorang Soeharto sambil tersenyum, berdiri gagah melayani pertanyaan para wartawan nasional dan internasional pada awal 1998, hanya untuk memperlihatkan bahwa kondisi kesehatannya masih stabil, tidak perlu memakai kantong infus ke mana-mana.

Ada pula sebagian pengamat justru memperhatikan sejumlah fenomena alam kasat mata mulai dari gunung, gempa bumi, banjir dan juga kebakaran serta kecelakaan yang notabene murni

akibat ulah manusia itu sendiri, hingga fenomena halus yang bersifat supernatural seperti kegiatan perdukunan, keris, wangsit, mimpi, ilham, Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Bagi para pengamat tersebut, aktifnya kembali Gunung Merapi atau terbakarnya Keraton Solo misalnya, bukan suatu peristiwa alam semata, melainkan juga justru pertanda bahwa wangsit kekuasaan Soeharto mulai menurun. Bahkan mungkin usianya itu sendiri. Melihat begitu banyaknya peristiwa alam dan musibah yang terjadi di Indonesia selama Orde Baru, bukan hal yang mengejutkan bila sebagian pengamat itu merasa frustrasi.

Pengamat lainnya lebih memperhatikan fakta-fakta masa lampau. Mereka percaya bahwa sejarah pasti berulang. Soekarno dulu jatuh karena hantaman krisis ekonomi berupa hiperinflasi, dan krisis politik berupa pembunuhan para perwira tinggi ABRI. Hal yang sama pula akan terjadi pada Soeharto. Lebih jauh, para pengamat ini berkeyakinan bahwa Soeharto akan dijatuhkan oleh plot persekongkolan politik tinggi. Konsekuensinya, bukan hal yang mengherankan bila suksesi kepresidenan akan membawa implikasi terhadap rakyat banyak.

Dengan menggunakan kearifan penjelasan *expost facto*, sebenarnya ada satu tanda signifikan yang menunjukkan bahwa negara dan masyarakat Indonesia sedang bergolak, bahwa kelompok-kelompok dalam kedua unit sosial tersebut sedang berupaya mencari berbagai legitimasi kekuasaan Orde Baru sudah habis, dan bahwa dalam kelompok-kelompok dalam negara dan masyarakat tersebut sedang berupaya mencari berbagai cara untuk mengakhiri masa jabatan Soeharto sebagai Presiden. Tanda itu adalah apa yang kemudia disebut secara populer sebagai kerusuhan. Jauh sebelum pidatonya yang bersejarah pada 21 Mei 1998, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa kerusuhan. Terlepas dari kondisi ekonomi dan politik yang sebetulnya cukup baik saat itu, negeri ini setidaknya sejak tahun 1995 mengalami banyak kerusuhan massal, dan intensitasnya condong terus meningkat hingga berpuncak pada pertengahan bulan Mei 1998. Kerusuhan-kerusuhan massal inilah, utamanya insiden Jakarta 13-14 Mei, yang mendorong terjadinya suksesi kepemimpinan nasional yang terasa bagaikan suatu antiklimaks itu.

Tidak seperti prediktor lainnya, kerusuhan cenderung bersifat halus dan tidak spesifik merujuk secara langsung kepada ramalan bahwa Soeharto akan jatuh. Berbagai kerusuhan yang marak terjadi dalam 4 tahun terakhir hanya sekedar menunjukkan bahwa sesuatu yang salah dalam masyarakat dan negara kita. Dan salah satunya adalah ketidak sediaan mereka untuk terus diperintah oleh seorang yang dianggap tirani dalm berkuasa.

Awalnya masyarakat menduga bahwa rangkaian kerusuhan itu merupakan hasil rekayasa negara, sebagai bagia dari strategi politik *divide et impera*. Tidak kurang dari ketua PBNU, Abdurrahaman Wahid, yang di suatu ketika pada tahun 1996 pernah menduga adanya suatu operasi yang dinamakannya sebagai Naga Hijau. Dugaan itu bertalian erat dengan fakta bahwa banyak kerusuhan terjadi di kota-kota kecil yang notabene merupakan basis tradisional kekuatan NU.

Uniknya, pimpinan republik ini memiliki pendapat yang berbeda. Menurutny, kerusuhan-kerusuhan yang banyak terjadi di kota-kota kecil itu merupakan suatu strategi komunisme gaya Mao untuk mengepung kota besar. Dengan kata lain, kerusuhan justru merupakan upaya masyarakat untuk merongrong kewibawaan negara, bahkan puncaknya akan diakhiri dengan mendongkel kepala negara dan pemerintah yang sedang berkuasa. Tidak diketahui secara pasti di sini apakah pernyataan Soeharto itu hanya merupakan rekaan spekulatif para pembantunya, atau berdasarkan kewaskitaannya sebagai negarawan yang berpengalaman. Faktanya, Soeharto memang akhirnya terjungkal dari kekuasaannya setelah rentetan kerusuhan yang terjadi di berbagai kota kecil itu akhirnya menerpa Jakarta.

Lengsernya rezim Orde Baru disebut-sebut sebagai kemenangan *civil society*. Berkat aliansi dari gerakan mahasiswa, kelas menengah, LSM dan sejumlah intelektual reformis telah memaksa

the untouchable Soeharto untuk melepaskan jabatan kepresidennya. Berbarengan dengan bergulirnya proses demokratisasi, perbincangan sekitar *civil society* serta merta muncul ke permukaan, karena ada persepsi suksesnya demokratisasi hanya dimungkinkan jika terdapat *civil society* yang kuat. Dalam pandangan Zinecker *civil society* terwujud sebagai sebuah struktur dan perkumpulan yang dibentuk oleh pelaku-pelaku yang mengisi ruang-ruang sosial masyarakat baik dalam perpektif keluarga, ekonomi ataupun negara. Masyarakat sipil merupakan bagian dari rezim politik, makanya ia bersifat politis. *Civil Society* mencakup segmen demokratis dan non-demokratis, beradab dan barbarian sekaligus. Masyarakat sipil yang demokratis adalah pula yang beradab (*civilized*), namun masyarakat sipil yang beradab tidak selamanya demokratis (Jb & Darmawan, 2016).

Salah satu elemen yang dikategorikan sebagai *civil society* itu adalah para intelektual. Bulan Januari 1998 adalah bulan puasa. Suhu politik tampak menurun, karena setiap orang berusaha untuk menahan diri dalam berkomentar maupun melakukan tindakan permusuhan lainnya di dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, sebagaimana ditakutkan oleh sebagian kalangan intelektual, dan seperti yang telah diprediksikan, beberapa kerusuhan berskala kecil telah pecah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di sepanjang pantai utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sebagian kalangan intelektual mulai khawatir atas perkembangan situasi, tetapi tak seorang pun tampak berbuat sesuatu untuk mencegahnya.

Kesadaran, bahwa semakin lama semakin banyak warga masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan makanan pokok, yang umumnya dikenal sebagai sembako telah menyebabkan munculnya rasa tidak nyaman di kalangan kaum intelektual. Sebagian Kalangan intelektual yang tergabung dalam LIPI ikut prihatin atas kondisi tersebut. Puncak dari keprihatinan mereka adalah ketika dikeluarkannya petisi oleh 19 peneliti LIPI yang intinya menghedaki adanya suksesi kepemimpinan nasional.

Intelektual lain yang memiliki peranan dalam suksesi kepemimpinan nasional adalah mereka yang menamakan dirinya kelompok 234. Mereka menamakan dirinya kelompok 234 karena pada umumnya anggota dari kelompok ini mengkomsumsi rokok Dji Sam Soe (234). Mereka itu antara lain MS Zulkarnaen, Heri Akhmadi, Ermawan Wangsaatmadja, Sjaiful Bachri Harahap, Bernard Napitupulu, Batara Lumbanraja, Manahara Hutagaol, Meilono Soewondo, Dadan Umar Daihani, Herman Suparman, Bakti Santosa dan Djazli. Mereka ini adalah alumni dari ITB. Diskusi-diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok mahasiswa telah membangunkan tekad bersama untuk mewujudkan kepemimpinan nasional yang sanggup membebaskan negara dari terpaan krisis.

Kaum intelektual di luar jakarta juga memiliki peranan dalam proses suksesi ini. Di Surabaya, kelompok intelektual yang dimotori oleh Tjuk Sukiadi, Daniel Sparingga dan Dede Oetomo. Ketiganya adalah dosen di Universitas Airlangga, dan memiliki jaringan luas di Jawa Timur. Tjuk Sukiadi misalnya, pada tahun 1998 menjabat sebagai koordinator jaringan pesantren di Jawa Timur. Mereka ii bukan hanya bergerak melakukan penyadaran di kalangan mahasiswanya sendiri, tetapi juga merambah mahasiswa di perguruan tinggi lain, misalnya ITS atau kampus-kampus swasta. Bahkan tidak lama kemudian, mereka bersama-sama mahasiswa melakukan program penyadaran masyarakat di sekeliling berbagai kampus. Tindakan yang pada masa-masa seperti itu jelas mengundang resiko yang tidak kecil.

Daniel dan Tjuk menghadapi kendala-kendala yang serupa dengan kaum intelektual di Jakarta atau Yogyakarta, meskipun berbeda, dalam mendukung gerakan mahasiswa. Mereka bekerja keras untuk menetapkan sejumlah batasan, antara lain demo-demo supaya dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan, supaya tidak memancing kerusuhan. Sebagian dari upaya dan kerja keras merekalah maka unsur kekerasan hadir secara minimum di Surabaya, dan kerusuhan tidak

terjadi secara masif. Tentu saja, ada lebih banyak lagi intelektual di Surabaya yang terlibat dan memberikan kontribusi mereka di dalam gerakan politik pada umumnya, dan gerakan mahasiswa pada khususnya. Para dosen di Universitas Surabaya (Ubya) dan Universitas Dr Sutomo (Unitomo), ITS, dan kampus-kampus lain.

Ketika krisis ekonomi mulai menyeret Orde Baru, banyak kalangan intelektual yang dalam berbagai cara mulai bergerak ikut menentang Rezim Orde Baru. Mereka terlibat secara langsung, bukan hanya pada tataran wacana, dalam proses demokratisasi secara mendalam. Namun, di permukaan, hanya tampak bahwa sumbangan kaum intelektual terbatas pada tulisan-tulisan mereka di media massa dan komentar atas isu-isu kontemporer di pers. Di bawah permukaan, banyak anggota kelas intelektual yang aktif menyebarkan kesadaran sosial, dan bahkan memfasilitasi serta mendorong mahasiswa untuk melancarkan demo-demo damai. Meskipun peran ini bukan hal yang baru bagi kelas intelektual Indonesia, skala mereka yang terlibat kegiatan politik secara aktif adalah yang terbesar di bawah era Orde Baru.

Banyak ilmuwan dan intelektual yang mendasarkan tindakan mereka pada penilaian ilmiah dan akademik, bahwa Soeharto tidak akan mungkin menyelesaikan krisis, karena dirinya sendiri adalah bagian dari sumber persoalan, dan bukan sumber penyelesaian masalah. Kapasitas intelektual mereka memungkinkan penerimaan publik secara luas. Mereka lebih diterima masyarakat awam dibandingkan suara politisi atau para aktivis tradisional lainnya. Afiliasi para akademisi dan intelektual ini bervariasi, meskipun sebagian besar terkait dengan universitas atau dunia kampus.

Kaum intelektual di Yogyakarta dan Surabaya tidak hanya ikut aktif membentuk opini publik, tetapi juga membantu mahasiswa untuk melancarkan demo-demo pertama mereka. Kisah Daniel Sparingga dan Tjuk Sukiadi di Surabaya adalah contoh mengenai peran yang khas tersebut. Begitu pula halnya dengan kaum intelektual di kota-kota lain. Peran yang dijalankan pada tingkat minimum ialah memberi kerangka analisis yang kritis terhadap perkembangan situasi, terutama pada masa krisis. Pada tahap selanjutnya, mereka berperan sebagai pembimbing moral bagi mahasiswa, khususnya dalam target-target aksi. Pada tingkat maksimum, peran itu berupa keterlibatan langsung dalam demo-demo mahasiswa, termasuk menyampaikan orasi dan “mempropaganda” mahasiswa. Beberapa dosen muda di UGM bahkan ikut membubarkan kelas mereka kalau ada demo, supaya mahasiswanya bisa ikut.

Yogyakarta adalah contoh terbaik mengenai peran kaum intelektual sebagai *concerned scholars* (ilmuwan yang memiliki kepedulian) atau bahkan *engaged scholars* (ilmuwan yang terlibat) sepanjang masa krisis. Sejak awal banyak akademisi dari UGM yang tidak hanya menyuarakan keprihatinan mereka secara terbuka, melainkan juga membantu mahasiswa melancarkan demo-demo mereka. Peran yang sangat menonjol ini antara lain dilakukan oleh Ichlasul Amal (Rektor UGM), Bambang Kartiko (Purek III UGM) dan Loekman Soetrisno. Tanpa keteguhan hati dan dukungan nyata mereka, mahasiswa akan sulit menaikkan eskalasi demo, sehingga semakin lama semakin membesar. Juga, tanpa “bimbingan” mereka mungkin saja demo-demo itu berujung dengan bentrokan yang diwarnai kekerasan dalam menghadapi aparat.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa semakin gencar setelah pemerintah mengeluarkan maklumat tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak serta tarif angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Aksi mahasiswa yang berpusat di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998, yang pada awalnya berlangsung secara damai, namun akhirnya semakin memuncak bahkan telah mengarah kepada tindakan yang bernuansa kekerasan pasca tertembaknya mahasiswa dari Universitas Trisakti yakni Hendriawan Sie, Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan dan Heri Hartanto. Tragedi Trisakti inilah yang kemudian memunculkan solidaritas dari kalangan

masyarakat umum maupun kampus yang berujung pada penilaian terhadap pemerintah yang dianggap tidak demokratis serta tidak memihak pada kepentingan rakyat.

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhi. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demonstrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR/MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden. Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara (Suparman, 2013).

KESIMPULAN

Dinamika kekuasaan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soeharto yang lebih populer dikenal dengan pemerintahan orde baru memang tidak terlepas dari adanya implikasi positif ataupun negatif. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada sebuah rezim pemerintahan yang selamanya demokratis ataupun otoritarian, karena pada dasarnya praktek pemerintahan tidak terlepas dari sebuah praktek kebudayaan yang dilakukan oleh para aktor. Penilaian yang negatif terhadap pemerintahan orde baru muncul ketika terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Pada awalnya gerakan tersebut hanya berupa aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di kampus-kampus di berbagai daerah. Tetapi pada gilirannya, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi/tuntutan mereka seolah-olah diacuhkan oleh pihak penguasa bahkan cenderung tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama daripada gerakan reformasi adalah menghendaki turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Turunnya Soeharto dari kursi pemerintahan tidak terlepas dari adanya elemen-elemen *civil society* (Masyarakat sipil) yang turut ambil bagian dari proses tersebut yang kemudian dikenal dengan suksesi kepemimpinan nasional yang mengarah kepada reformasi.

DAFTAR REFERENSI

- Andrianus, F., & Niko, A. (2006). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 1997: 3 –2005: 2. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2).
Christmas, S. K., & Purwanti, E. (2020). Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep

- Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 222–235.
- Djambak, S. (2008). Faktor Dominan Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 23–38.
- Hakim, L. nul. (2016). Transformasi Ekonomi-Politik Jerman dan Regionalisasi Ekonomi di Asia. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(1), 79–100.
- Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. Anak Hebat Indonesia.
- Hariyanto, E. (2020). *Mewaspada Terulangnnya Krisis Ekonomi 1998 & Upaya Pencegahannya*. @ jualinbukumu.
- Jb, M., & Darmawan, L. (2016). Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35–64.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mufti, M. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. CV. Pustaka Setia.
- Mughits, A. (2016). Berakhirnya Mitos Dikotomi Santri-Abangan. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 3(2), 276–288.
- Mustofa, M. U. (2019). Tinjauan kritis populisme di indonesia, antara gagasan atau cara baru sirkulasi elit? *Jisipol/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 70–84.
- Nasikun. (2008). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Puspitasari, R. (2018). *Revolusi Prancis, Revolusi Industri, Perkembangan Ideologi Kapitalsme, Sosialisme, Liberalisme, dan Demokrasi; dan Dampaknya bagi Masyarakat Dunia, Perkembangan Masyarakat Jepang Sejak Restorasi Meiji dan Dampaknya Di Dalam dan Di Luar Negeri*. Cirebon, IAIN Syeikh Nurjati.
- Putra, I., & Indrajaya, I. G. B. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi, Utang Luar Negeri Dan Suku Bunga Kredit Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1996-2011. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(11), 492–546.
- Rahman, A., Ahmadin, A., & Rifal, R. (2021). Peran Strategis Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme. *Jurnal Artefak*, 8(2), 97–110.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sulistyo, H. (2002). *Lawan: Jejak-Jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto*. Jakarta: Pensil-324.
- Suparman, D. (2013). *Jejak Kudeta (1997-2005): Catatan Harian Jenderal (Purn) TNI Djadja Suparman*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susan, N. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana.
- Wolf, M. (2007). *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Yusup, Y. (2021). Respon Kristen Terhadap Kebijakan Asas Tunggal Pancasila Era Orde Baru. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1–22.
- Zulfikar, A. (2018). Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Alqanuni di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah). *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 6(1), 87–106.